

Program yang telah dan sedang dilakukan

1. Pertemuan konsolidasi antara komponen sipil Aceh (bulanan, 2002 -2003).
2. Perumusan proposal perdamaian secara bersama HDC, Perwakilan GAM dan RI di Tim Jeda Kemanusiaan. (Menjelang Perundingan Jenewa yang menghasilkan CoHA) – akhir 2002.
3. Perumusan Mekanisme All inclusive Dialog secara bersama komponen masyarakat sipil dengan melibatkan tim JSC (GAM, RI, dan Internasional) - Awal 2003.
4. Informasi tentang proses perdamaian Aceh (2002 -2003).
5. Seminar-seminar Internasional (2003 – 2004).
6. Pertemuan reguler menggagas kembali perdamaian pasca darurat militer (2004).
7. Menginisiasi dan menjadi koordinator perumusan UU Pemerintahan Aceh versi Masyarakat Sipil, serta advokasi proses pembentukan RUU sampai ditetapkan menjadi UU No. 11 Tahun 2006. (Support Yappika dan DRSP).
8. Seminar dan Lokakarya Decommissioning, Demobilization, and Reintegration (DDR), bersama UNDP dan USAID, yang hasilnya melahirkan Forum Bersama Reintegrasi, yang kemudian membentuk BRA. – Desember 2005.
9. Seminar dan Lokakarya tentang Reintegrasi untuk korban konflik – Februari 2006. (BRR NAD – Nias).
10. Program Advokasi masyarakat sipil terhadap korban konflik dan tsunami – Agustus 2005 s/d Juli 2006. (Support CAFOD).
11. Program Penguatan Masyarakat sipil untuk menjaga dan mempertahankan perdamaian serta mentransformasikan konflik di Aceh. – September 2006 s/d Agustus 2007. (Support CAFOD & Caritas Australia).
12. Pengawasan dan sosialisasi Kinerja DPRA (April 2007 - Des 2007).
13. Mendorong sinergisasi Multistakeholder Aceh untuk Perdamaian dan pembangunan di Aceh (Jan 2008 - Jun 2009).
14. Sosialisasi dan Penyempurnaan Draft Scenario Building Aceh Masa Depan (Aceh Baru) - (Mar 2008 - Sept 2008)

Program dan Aktifitas yang akan dilakukan

1. Membangun komunikasi dan hubungan yang baik antara masyarakat sipil Aceh dengan Pemerintah dan Legislatif.
2. Membangun komunikasi dan konsolidasi antara aktor-aktor kunci di pemerintahan, legislatif dan komponen strategis lain, dalam upaya menjaga proses damai di Aceh.
3. Melakukan penguatan terhadap forum komunikasi masyarakat sipil di kabupaten/kota.
4. Melakukan penguatan dan konsolidasi berkelanjutan terhadap potensial-potensial persons di Aceh.
5. Menganalisa persoalan sosial, budaya, ekonomi dan politik terkini dan mencari berbagai solusi penyelesaiannya.
6. Membangun Koordinasi dan jaringan berkelanjutan dengan komunitas internasional untuk terus peduli dan berkontribusi dalam menjaga dan mengisi proses damai berkelanjutan di Aceh.

Anggota ACSTF

PENGURUS

Ketua	: H. Imam Syuja'
Sekretaris	: Juanda
Anggota	: Otto Syamsudin Ishak Hasballah M. Saad Muchtar Aziz Daniel Djuned Ruslan Razali Aguswandi BR Farida Haryani Jufri Alm. Prof. DR. Isa Sulaiman Alm. Gani Nurdien

PELAKSANA HARIAN

Sekretaris Jenderal	: Juanda
Program Manajer	: Banta Syahrizal
Manajer Operasional	: Fauziah
Keuangan	: Nurlita
Administrasi	: Nova Susanti
Kesekretariatan	: Zamzami
Advokasi Kebijakan Publik	: Nina Noviana Yudi
Konsolidasi dan Jaringan	: Zairi Reza
Komunikasi dan Informasi	: Ryan Kautsar A Ricky A.T

Kantor ACSTF

Jln. Merak, No. 46D, Neusu Aceh,
Kec. Baiturrahman Banda Aceh
Aceh 23244,

Telp/Fax : +62651-635010,
+62651-31951

email : acstf@acstf.org
acstf.aceh@gmail.com

Web : <http://www.acstf.org>

Achehnese Civil Society Task Force



Latar Belakang

Konflik yang berlangsung di Aceh telah menimbulkan dampak yang parah terhadap berbagai komponen masyarakat sipil Aceh. Ribuan orang yang dicintai (orang tua, istri, suami dan anak-anak) telah gugur, mengalami penyiksaan dan cacat, menjadi janda dan anak yatim, kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Ratusan sekolah terbakar, sehingga mengganggu proses pendidikan. Lebih jauh dari itu, masyarakat sipil hampir tidak memiliki akses terhadap hukum, sementara sebagian besar lembaga pengadilan tidak berfungsi lagi.

Kenyataan di atas telah menyadarkan berbagai pihak tentang perlunya menampung aspirasi masyarakat sipil dalam proses perdamaian di Aceh. Sejumlah usaha untuk menyerap aspirasi masyarakat sipil telah dilakukan. Berturut-turut diantaranya adalah MRA (Musyawarah Rakyat Aceh), KRA (Kongres Rakyat Aceh), KOMPAS (Kongres Mahasiswa dan pemuda Aceh Serantau). Akan tetapi hasil yang dicapai sampai saat itu belum maksimal, karena mendapat reaksi dari berbagai kelompok masyarakat yang mempersoalkan organisasi dan personalia pelaksana, keterwakilan komponen sipil dan misi dari forum-forum tersebut. Akibatnya, korban terus berjatuh dan masyarakat sipil belum dapat menggalang kekuatan dan menyuarakan kepentingannya sendiri.

Berlandaskan kenyataan itu, 54 orang yang berasal dari komponen yang berbeda dalam masyarakat sipil Aceh menghadiri "Brotherly Dialog among Acehnese for a Just Peace in Aceh" di Washington DC, 5 s.d. 8 Oktober 2001 membentuk ACSTF (Acehnese Civil Society Task Force). Konferensi ini diadakan oleh International Forum For Aceh (IFA) dan Global peace Centre of American University.

Dalam konferensi ini turut hadir Ir. Azwar Abubakar (gubernur Aceh pada saat itu) sebagai perwakilan dari pemerintah Republik Indonesia dan Dr. Zaini Abdullah perwakilan dari Gerakan Aceh Merdeka. Konferensi ini memiliki beberapa rekomendasi, antara lain, terpilihnya sepuluh orang yang akan menjadi anggota ACSTF dalam melaksanakan point-point penting yang berhubungan dengan konsolidasi dan pemberdayaan komponen sipil Aceh.

ACSTF juga dimandatkan dalam mengambil inisiatif-inisiatif untuk mendorong terwujudnya solusi damai berkesinambungan terhadap konflik Aceh lewat pendekatan dialog dan tanpa kekerasan dengan pelibatan masyarakat sipil Aceh, Indonesia dan internasional.

Pasca MoU Damai 15 Agustus 2005 di Helsinki antara pemerintah Republik Indonesia dengan GAM, ACSTF kembali membangun komunikasi dan konsolidasi komponen masyarakat sipil Aceh untuk menjaga proses damai ini. Hal penting yang harus segera direspon saat itu adalah pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU-PA) sesuai amanat MoU Helsinki. Sehingga ACSTF menginisiasi proses perumusan UU-PA versi masyarakat sipil serta pengawalan pembentukan UU tersebut dari proses perumusan rancangan UU sampai pembahasannya di DPR RI.

Saat ini, ACSTF meneruskan misinya untuk menjaga dan mempertahankan proses damai di Aceh dengan berbagai inisiatif aktifitas yang dirangkai untuk membangun kondisi saling mengisi dalam pengelolaan pemerintahan Aceh. Sehingga akan terbangun kerjasama antara sesama komponen masyarakat sipil serta juga dengan pemerintah dan legislatif Aceh. Selain itu, ACSTF juga tetap mengundang masyarakat internasional untuk terus melihat dan berkontribusi dalam berbagai bidang dalam bingkai mengisi perdamaian yang berkelanjutan di Aceh.

Visi

Mewujudkan Aceh yang damai, demokratis, adil dan transparan dengan menjunjung tinggi HAM dan perlindungan bagi Masyarakat Sipil, serta konsisten menuju keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Misi

1. ACSTF berinisiatif mencari dan mempromosikan cara-cara penyelesaian damai yang berkelanjutan terhadap konflik Aceh melalui pendekatan dialog dan tanpa kekerasan dengan keterlibatan masyarakat internasional.
2. ACSTF memfasilitasi komunitas internasional untuk terlibat dalam memperkuat kapasitas masyarakat sipil di Aceh, sebagai salah satu bagian tata dunia yang damai, yang menghormati HAM dan system demokrasi yang sejati.
3. ACSTF memperkuat dan mengembangkan kerja-kerja yang selama ini telah dilakukan oleh komponen masyarakat sipil lainnya dalam proses damai dan demokrasi di Aceh
4. ACSTF menjaga keberlanjutan proses damai di Aceh, dengan mendorong partisipasi masyarakat sipil Aceh didalamnya.
5. ACSTF mendorong dan mengawal pengimplimentasian Undang-undang Pemerintahan Aceh sesuai dengan maksud

UU tersebut dibuat, serta mendorong penyempurnaannya agar sesuai dengan semangat perdamaian dan MoU Helsinki (Perjanjian Damai RI dan GAM 15 Agustus 2005).

6. ACSTF memfasilitasi sinergisasi dan komunikasi interaktif serta sehat antara komponen masyarakat sipil Aceh dengan pemerintah dan legislatif ditingkat Aceh dan Nasional.

Tujuan

1. Mengadvokasi resolusi konflik melalui cara-cara dialog dan tanpa kekerasan dengan melibatkan masyarakat internasional.
2. Melakukan konsolidasi gerakan masyarakat sipil untuk perdamaian dan keadilan di Aceh.
3. Memperkuat dan mengembangkan posisi tawar (bargaining position) masyarakat sipil Aceh melalui usaha-usaha local dan dukungan masyarakat internasional
4. Mendorong dan mengembangkan kapasitas masyarakat sipil Aceh dalam berkontribusi membentuk pemerintahan yang baik di Aceh.
5. Membangun dan mendorong kondisi kerjasama yang baik antara CSO dengan Eksekutif dan legislatif, demi terbangunnya kondisi saling mengisi dan memperbaiki untuk pengelolaan pemerintahan dan pembentukan kebijakan.

Target

1. Mensupport Acehnese Civil Society Task Force sebagai institusi yang akan memfasilitasi konsolidasi komponen masyarakat sipil Aceh.
2. Terbangunnya forum-forum komunikasi masyarakat sipil Aceh di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sebagai wadah konsolidasi dan koordinasi dalam menjaga proses damai di Aceh.
3. Berkembangnya sektor-sektor masyarakat dalam mewujudkan representasi masyarakat sipil Aceh.
4. Membangun struktur perdamaian yang lebih terarah.
5. Mengangkat wacana public terhadap berbagai fenomena yang terjadi di Aceh.
6. Terbangunnya kerjasama dan koordinasi yang baik antara Masyarakat sipil Aceh dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan legislatif demi perbaikan sistem kelola pemerintahan serta pembentukan kebijakan di Aceh.